



Serukan Bongkar Struktur Korupsi di DIJ

SEJUMLAH lembaga menyerukan pembokaran struktur korupsi. Bukan hanya yang terjadi di Kota Jogja, tapi juga potensi di seluruh Provinsi DIJ. Menyusul operasi tangkáp tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS).

Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijaksanaan Publik (LHKP) PW Muhammadiyah DIJ David Effendi mendukung aksi resesik Kota Jogja. Sebab, lembaganya konsisten dalam memerangi korupsi. Menurutnya, korupsi merupakan musuh peradaban dan kemanusiaan. Karena dari korupsi, praktik pemiskinan secara struktural terjadi. "Dukung Jogja lebih baik, lebih bersih, bukan hanya konteks Kota Jogja. Tapi bebersih DIJ," tegasnya dalam konferensi pers yang digelar di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja kemarin (9/6) **▶ Baca Serukan... Hal 7**



KUSNO S. UTOMO/RADAR JOGJA

BEREDAR: Kartu penerus disposisi laporan hasil pelaksanaan tugas terkait 'Pemanfaatan Tanah Negara untuk Taman Terbuka Hijau oleh Swiss Belhotel YK'. Kartu saat ini beredar di lingkungan DPRD Kota Jogja.

Serukan Bongkar Struktur Korupsi di DIJ

Sambungan dari hal 1

David juga mengharapkan KPK untuk menelisik segala perizinan di Jogjakarta. Tidak hanya terbatas pada izin mendirikan bangunan (IMB) hotel dan apartemen, tapi juga toko berjejaring modern. "Saya kebetulan turut mengadvokasi toko berjejaring modern," ucapnya.

Berdasar catatannya, banyak operasi toko berjejaring modern menyalahi aturan. Semisal buka 24 jam, padahal tak memiliki izinnya. Kemudian temuan toko yang tidak memenuhi jarak minimal dengan pasar tradisional. "Jadi saya kira bukan hanya isu apartemen, hotel, yang mengindikasikan kecurangan," ujarnya.

Haidar, pegiat Ide dan Analitika Indonesia (Idea) mengaku dapat laporan sebanyak 192 dugaan korupsi. Dari sekian laporan itu, juga termuat laporan tentang HS, wali Kota Jogja dua periode, Desember 2011-20 Desember 2016 dan 22 Mei 2017-22 Mei 2022. Dari sekian laporan itu pula, KPK hanya sekali melakukan OTT. "Penindakan KPK sangat rendah," lontarnya.

Haidar pun menuding ada ketidaktahuan atau keengganan dari KPK, dalam melakukan penindakan kasus korupsi di Jogja. Lantaran upaya KPK berhenti pada pencegahan. "Padahal, tindakan yang mengarah pada pidana korupsi sangat besar," ucapnya.

Diungkap, Idea pernah melayangkan laporan ke pengelolaan dana keistimewaan (Danais) DIJ pada KPK. Terkait pembangunan eks Bioskop Indra yang sekarang

jadi lokasi relokasi PKL. Tapi laporan itu tidak ditindaklanjuti. "Pemprov DIJ sudah mencairkan dana tali asih Rp 18 miliar, sampai sekarang belum jelas," ujarnya.

Dijelaskan, Danais memiliki potensi besar terhadap penyalahgunaan. Sebab jumlahnya tiap tahun bertambah. Tapi pengawasan kredibilitas rendah. Bahkan transparansi pengelolaan danais dapat rapor merah. Pada 2020 lalu pemprov juga menggunakan danais untuk membeli Hotel Mutiara di kawasan Malioboro. Awalnya disebut untuk gerai UKM. Tapi sampai sekarang belum dimanfaatkan.

"Artinya sangat rendah. Satu contoh, dana besar dikelola dengan tidak transparan. Saya kira ini jadi PR ke depan. Semoga KPK bisa masuk ke ruang-ruang itu. Danais adalah *privilege* yang dimiliki Jogja dan tidak dimiliki oleh daerah lain," sorotnya.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman juga meminta KPK untuk melusaskan kasus temuan terhadap HS. Seperti yang pernah diterapkan sebelumnya. OTT dengan uang sebesar Rp 70 juta membongkar struktur korupsi ratusan miliar yang terjadi di Probolinggo. "Karena jarang tersangka ditangkap KPK sebagai penerimaan pertama. Saat ditangkap, cenderung penerima suap atau gratifikasi sudah untuk kesekian kali. Sudah bentuk kebiasaan," cecarnya.

Zaenur menjelaskan, pembongkaran struktur ini dapat dilakukan menggunakan pendekatan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sebab, pendekatan ini dapat membongkar aliran dana. Sehingga dapat dilakukan pengejaran terhadap siapa saja yang menerima aliran dana tindak korupsi.

"Ini sekaligus membersihkan Jogja. Bukan hanya satu-satunya, tapi awal membersihkan Jogja dari tindak korupsi akut dan pembangunan ugul-ugalan tanpa memperhatikan aspek lingkungan," ucapnya menekankan.

Diharapkan pula KPK juga dapat memberi efek jera pada korporasi pemberi suap. Jadi, bukan hanya pribadi pelaku suap saja yang dihukum. Tapi korporasi harus diminta pertanggungjawabannya juga. "Ini penting untuk penjeraman. Agar korporasi lain yang mau beroperasi di Jogja tidak ugul-ugalan. Tidak menggunakan cara melawan hukum, seperti suap atau gratifikasi," serunya.

Sebagai perwakilan warga budaya, Dodo Putra Bangsa juga meminta KPK melakukan penceramatan luas. Penceramatan bukan hanya dilakukan pada periode kedua kepemimpinan HS. Tapi harus dilakukan sepanjang HS memimpin Kota Jogja. "Pada Desember 2013 masuk 106 permohonan. Tanggal 1 Januari 2014 sampai 2016 moratorium penghentian izin hotel," jelasnya.

Dodo menekankan, pecah telur OTT KPK di Jogja harus jadi langkah awal. Dalam upaya membongkar struktur korupsi di DIJ. "Kami minta KPK supaya tidak bosan main ke Jogja. Karena Jogja lahir dari nostalgia, kenangan, dan korupsi," tandasnya. (**fat/laz/fj**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005